

Undang-Undang **PERKAWINAN**



INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

Undang-Undang **KEWARGANEGARAAN**

2007

Penerbit :
~ FERMANA BANDUNG ~

13
**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974**

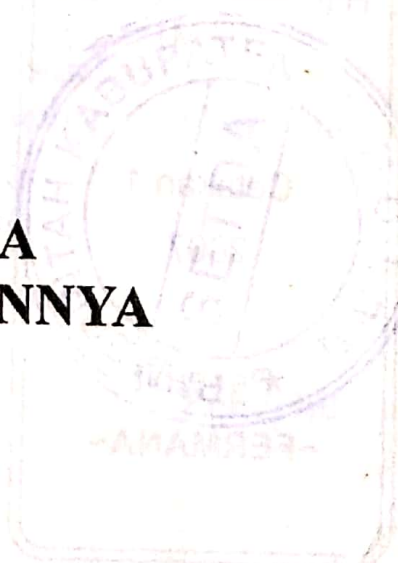
TENTANG

PERKAWINAN

**BESERTA
PENJELASANNYA**

**Penerbit :
~ FERMANA BANDUNG ~**

0805
346
AP /



Judul Buku :

Undang-Undang RI.
No. 12 Tahun 2006
Tentang
Kewarganegaraan
Republik Indonesia

&

Undang-Undang
Republik Indonesia
No. 1 Tahun 1974
Tentang
PERKAWINAN

Serta

Undang-Undang
Republik Indonesia
No. 39 Tahun 1999
Tentang
Hak Asasi Manusia
(HAM)

Cetakan 1
2007

Penerbit
~FERMANA~

*Dilarang mengutip, memperbanyak,
dan menerjemahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit*
Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Perkawinan merupakan landasan hukum perkawinan yang dari dulu menjadi pegangan dan sudah berlaku bagi berbagai golongan di dalam masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan ini juga kami lengkapi dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia beserta Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Disini juga dicantumkan beberapa Peraturan Pemerintah Undang-Undang terkait lainnya:

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1994 tentang Izin Keimigrasian
3. Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Istilah Non Pribumi
4. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan bagi PNS

Mudah-mudahan buku Undang-undang ini bisa bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia. Kalau ada kesalahan dan kekeliruan dalam pengetikan buku ini, kami dari penerbit mohon kritikan dan masukan dari pembaca.

Penerbit



Keputusan Menteri Kehamkiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.IZ.03.10 Tahun 2004 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 Tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-IZ.03.10 Tahun 1997	204
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	217
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	240
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	252
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	272
Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	285
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	298
Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	305
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	313
Departemen Dalam Negeri RI	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
Undang-undang Ri No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	1
Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.....	24
Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	33
Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	79
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian	113
Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian	141
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk Dan Izin Keimigrasian	166
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk Dan Izin Keimigrasian	184
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk Dan Izin Keimigrasian	195
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk Dan Izin Keimigrasian	199
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi Dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan Dan Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan Program Atau Pelaksanaan	201

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 1978
tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai
Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat
Kristen Indonesia yang Tunduk Kepada
Saatblad 1933 75 JO Staatblad 1936-607 dan Bagi
Umat Hindu dan Budha. 320

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221 A
Tahun 1975 Tentang Pencatat Perkawinan dan
Penceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan
dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan
serta Peraturan Pelaksanaannya 327

Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/
Panglima Angkatan Bersenjata No.: KEP/01/I/1980
Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan
Rujuk Anggota ABRI 331

Petunjuk Teknis No. Pol : JUKNIS/01/III/1981
Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi
Anggota POLRI 352